



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
(BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN SARANA PUBLIKASI)

Rapat Ke	: 19
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
Hari, Tanggal	: Senin, 15 Juni 2026
Pukul	: 10.00 – 12.47 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. P Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: 1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-K/L) Tahun Anggaran 2027; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 39 Anggota Komisi VII DPR-RI/8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Kepala BSN (Bapak Donny Purnomo J.E.); dan 2. Plt. Sekretaris Utama (Bapak Wahyu Purbowasito) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSN, pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 15 Juni 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (F.P Gerindra).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai:
 - a. Serapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp80.306.697.019,- (*Delapan puluh miliar tiga ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah*) atau sebesar 47,30% dari total pagu anggaran efektif sebesar Rp169.763.469.000,- (*Seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);
 - b. Kinerja Triwulan I TA 2026, antara lain: (1) Penetapan 46 SNI dan kaji ulang 89 SNI untuk mendukung daya saing dan kebutuhan pembangunan nasional; (2) Program SNI Bina UMK telah menjangkau 1,08 juta UMK, disertai fasilitasi sertifikasi dan ekspor produk UMKM; (3) Penerbitan 568 SPPT SNI dan penyusunan 16 informasi persyaratan standar negara tujuan ekspor; (4) Akreditasi 721 laboratorium dan 480 lembaga sertifikasi/inspeksi guna memperkuat infrastruktur mutu nasional; dan (5) Penerbitan 968 sertifikat kalibrasi serta penguatan kompetensi SDM standardisasi melalui pelatihan dan *e-learning*;
 - c. Pagu indikatif Badan Standardisasi Nasional TA 2027 sebesar Rp217.918.336.000,- (*Dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) guna mendukung program pemerintah di sektor standardisasi nasional; *dan*
 - d. Fokus utama program kerja BSN TA 2027 adalah mendukung hilirisasi, swasembada pangan, kemandirian energi, serta ekonomi hijau dan biru melalui pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU);*dan*
 - e. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran BSN TA 2027 sebesar Rp82.111.000.000 (*Delapan puluh dua miliar seratus sebelas juta rupiah*) sehingga total usulan anggaran menjadi Rp300.029.336.000,- (*Tiga ratus miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
2. Badan Standardisasi Nasional wajib menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Menyampaikan rincian realisasi anggaran yang lebih terperinci per kegiatan dan unit kerja;
 - b. melakukan penyesuaian dan penajaman usulan tambahan anggaran TA 2027 agar lebih fokus pada program yang memberikan manfaat terukur bagi daya saing industri dan penguatan UMKM;
 - c. Memaksimalkan target ekspor produk ber-SNI pada tahun 2027 guna meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
 - d. Meningkatkan cakupan pembinaan dan sertifikasi SNI bagi UMKM minimal 1.050 Sertifikat SNI; *dan*

- e. Memperkuat standardisasi dan pengawasan mutu produk makanan dan minuman, baik lokal maupun impor, guna melindungi kesehatan masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.47 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
WAKIL KETUA,**

TTD

**RAHAYU SARASWATI D.
DJOJHADIKUSUMO**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,**

TTD

DONNY PURNOMO J.E.